BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia diperkirakan akan mengalami 'bonus demografi' pada rentang tahun 2030-2040. Bonus demografi adalah fenomena dimana jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65+). Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 275,77 juta jiwa yang terbagi menjadi 190,98 juta jiwa (69,25%) masuk kategori usia produktif sedangkan 84,8 juta jiwa (30,75%) tergolong usia tidak produktif. Penduduk usia tidka produktif ini terbagi lagi menjadi 66,2 juta jiwa yang belum produktif dan 18,6 juta jiwa yang sudah tidak produktif. Pada titik ini, angka ketergantungan Indonesia adalah 44% yang berarti tiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 44 penduduk tidak produktif. Hal ini menjadi petunjuk bahwa Indonesia sudah memasuki masa bonus demografi, dimana era bonus demografi ditandai dengan angka ketergantungan atau dependency ratio sebesar kurang dari 50.(BPS RI 2023)

Bonus demografi bisa menjadi fenomena seperti koin dengan dua mata sisi, dimana kedua sisi dapat menjadi keuntungan atau kerugian bagi negara. Bonus demografi akan menguntungkan saat jumlah penduduk produktif yang besar dibersamai dengan pendidikan dan kemampuan yang berkualitas, serta kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja sehingga menghasilkan output bagi negara. Namun saat jumlah penduduk produktif yang besar tersebut tidak dibersamai dengan pendidikan yang memadai dan lapangan kerja yang cukup, yang

akan terjadi adalah peningkatan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat kriminalitas disuatu wilayah.

Salah satu fenomena bonus demografi yang gagal dimanfaatkan dengan baik terjadi di negara Afrika Selatan. Dilansir dari tulisan Mogomotsi diartikel berita Apnews, tingkat pengangguran di Afrika Selatan telah mencapai 33% dan merupakan tingkat pengangguran tertinggi didunia. Hal ini pulalah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan penjarahan dan korban meninggal mencapai lebih dari 350 orang. (Magome 2023)

Pengagguran merupakan salah satu musuh besar dalam fenomena bonus demografi karena pengangguran dalam jumlah besar dapat berdampak pada penurunan pendapatan nasional, peningkatan kemiskinan, penurunan konsumsi, peningkatan kriminalitas, konflik sosial, gangguan kesehatan mental, hambatan pendidikan, dan pengikisan nilai-nilai budaya. Permasalahan pengangguran ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dicakup oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di poin ke 8 yakni mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Pada tahun 2022 tingkat pengangguran Indonesia adalah sebesar 5,86 persen. Sedangkan Rapat Kerja Komisi DPR RI, Presiden Indonesia, Jokowidodo menyampaikan bahwa indikator sasaran pembangunan dalam RPJMN 2024 disepakati target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5 persen. (Bappenas RI 2015)



Gambar 1.1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia 2017-2023. (Sumber: BPS RI 2023)

Berbagai upaya dan program dijalankan pemerintah untuk terus menekan angka pengangguran dan proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Pemerintah terus berusaha menurunkan angka pengangguran dan jumlah usia muda yang tidak bekerja atau tidak memiliki pendidikan atau pelatihan. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan adanya program kartu prakerja yang dirilis tahun 2020. Hingga tahun 2023 program ini telah diikuti hingga mencapai 17,6 juta orang dari seluruh wilayah Indonesia.

Program ini memberikan pelatihan dan bantuan berupa uang sebagai intensif bagi peserta yang mendaftar dan lolos seleksi dengan harapan setelah pelatihan para peserta lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun pada prosesnya program ini juga memiliki tantangan tersendiri seperti tidak adanya mekanisme evaluasi atau monitoring yang efektif terhadap

pelaksanaan program Kartu Prakerja dan adanya penyalahgunaan dana oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia yang menyatakan bahwa program kartu prakerja di beberapa wilayah tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan oknum oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.



Gambar 1.2 Jumlah Peserta Program Kartu Prakerja (Jiwa) Tahun 2020-023. (Sumber : Satu Data Indonesia 2023)

Walau program kartu prakerja telah 4 tahun berjalan, tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,32 persen, masih lebih tinggi dari angka pengangguran di tahun 2019 yakni sebesar 4,9 persen. (BPS RI 2023) Hal ini membuat peneliti tergerak untuk melihat apakah program kartu prakerja berpengaruh terhadap angka pengangguran di Indonesia.

Selain itu salah satu tantangan lain bagi pemerintah dalam pengentasan isu sosial ekonomi dalam pembangunan antara lain adalah tantangan kewilayahan. Negara Indonesia membentang sepanjang 6400,361 km dan terdiri dari 17.508 pulau dengan 5 pulau besar sebagai pusat peradaban dan perekonomian. Setiap wilayah Indonesia memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda yang menjadi keragaman namun juga menjadi tantangan dalam penyelesaian isu Pembangunan seperti pengangguran.

Penelitian dari Azmi dkk tahun 2019 dilingkup Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya keterkaitan spasial pada kasus pengangguran. Terlihat adanya pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. (Azmi and Rizqi 2019)

Oleh karena itulah peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian mengenai pengaruh program kartu prakerja dan faktor makro ekonomi laiinya terhadap pengangguran di Indonesia dengan melibatkan aspek kewilayahan.

1.2 Rumusan Masalah

Program kartuprakerja yang telah dilaksanaan oleh pemerintah sejak Apil 2020 telah menghabiskan anggaran mencapai 59 triliun di 2022 dan kembali dianggarkan sebesar 4,8 triliun di tahun 2024 oleh pemerintah. Walau sudah empat tahun berjalan, program ini memiliki banyak hal yang menjadi tantangan dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keberhasilannya terhadap kasus pengangguran di Indonesia. Selain itu kasus pengangguran juga dipengaruhi oleh banyak hal lain seperti faktor ekonomi makro yang ada di Indonesia.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana pengaruh program Kartu Prakerja terhadap kasus pengangguran terbuka pada 34 provinsi di Indonesia ?
- 2. Faktor-faktor makro apa sajakah yang mempengaruhi tingkat pengangguran melalui pendekatan spasial berdasarkan wilayah administratif 34 provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis dampak program Kartu Prakerja terhadap kasus pengangguran terbuka pada 34 provinsi di Indonesia.
- Untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka melalui pendekatan spasial berdasarkan wilayah administratif 34 provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori dalam kajian terkait dampak program kartu prakerja dan faktor variabel makro ekonomi terhadap pengangguran tinggi di Indonesia. Di lain sisi, diharapkan menjadi pemicu untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam penelitian terkait variabel-variabel diluar yang telah diteliti dalam penelitian ini;

Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada kebijakan pemerintah dalam evaluasi dampak program kartu prakerja di Indonesia, khususnya Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Instansi terkait sebagai yang

terkait penentuan kebijakan dalam mengurangi jumlah pengangguran di 34 provinsi yang luas dan memiliki karakteristik beragam di Indonesia.

1.5. Kebaruan

Penelitian ini mengangkat topik pengaruh program kartu prakerja dan fariabel makro ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia setelah diterapkannya program kartu prakerja di tahun 2020 dengan penggunaan metode Regresi panel spasial. Melalui metode tersebut, dapat dilihat apakah program kartu prakerja memiliki pengaruh terhadap kasus tingkat pengangguran di 34 provinsi-provinsi Indonesia.